
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENJAGA DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN TANTANGAN PEMILU DI KOTA PEMATANG SIANTAR

Oleh

Haykal M Raihan¹, Kristiani Pasaribu², Peninna Simanjuntak³, Vanesia Amelia Sebayang⁴

^{1,2,3}Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

⁴Prodi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹haykelraihan87@gmail.com, ²Kristianipasaribu6@gmail.com,

³peninna@usu.ac.id, ⁴vanesia.amelia@usu.ac.id

Article History:

Received: 15-12-2023

Revised: 04-01-2024

Accepted: 18-01-2024

Keywords:

Election History, Election History in Pematang Siantar City, Roles and Challenges of Election Organizers

Abstract: *This paper aims to analyze the roles and challenges faced by the Pematang Siantar General Election Commission (KPU) from 2019 to 2024. In 2019, the Pematang Siantar KPU prepared for the general elections to be held in 2020. However, challenges arose when the Covid-19 outbreak hit in 2020, hampering various activities of the Pematang Siantar KPU. Another challenge arose in 2021 when one of the election winners, Mr. Asner, passed away. Despite facing many challenges, the Pematang Siantar KPU has made innovations in carrying out its duties. In the following years, the situation began to be controlled, especially in 2022-2023, where the Pematang Siantar KPU returned to its normal duties to prepare for the 2024 elections. The roles and challenges faced by the Pematang Siantar KPU during the 2019-2024 period will be the main focus of this paper. The research method used is the historical method with four stages. First, data collection is done through digital news and oral interviews. Second, the data is verified for authenticity and credibility. Third, the data were combined to be analyzed from 2019 to 2024. Finally, the results of the analysis are presented in a paper that highlights the different roles and challenges faced by the Pematang Siantar KPU, especially in critical years such as 2020 and 2021*

PENDAHULUAN

Kegiatan pemilihan umum (pemilu) di suatu daerah sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk pihak yang bertanggung jawab, kondisi lingkungan, dan situasi tertentu. Di Kota Pematang Siantar, Badan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan pemilu di daerah tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau kepanjangan Komisi Pemilihan Umum.

KPU Pematang Siantar memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kelancaran pemilihan umum di kota tersebut. Peran dan tantangan yang dihadapi oleh KPU ini telah

menjadi bagian rutinitasnya. Peran dan tantangan ini memiliki berbagai bentuk yang bervariasi, yang dapat terjadi atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan, masyarakat sekitar, dan faktor lainnya.

Tulisan ini bertujuan untuk secara komprehensif menggambarkan peran dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kota Pematang Siantar selama periode 2019-2024. Dengan memeriksa peran KPU dalam konteks spesifik ini, tulisan ini juga berharap dapat memberikan panduan atau contoh bagi KPU di wilayah lain di Sumatera Utara atau di luar provinsi tersebut. Pada tahun 2019, peran KPU adalah mempersiapkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Pada saat itu, perannya relatif sederhana, termasuk koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Sumatera Utara. Tingkat partisipasi pemilih juga meningkat menjadi 81,2%, melebihi target sebesar 77,5%. Hal ini ditandai dengan partisipasi pemilih disabilitas di Kota Pematang Siantar (Hu, 2019).

Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2020 ketika wabah Covid-19 melanda. Wabah ini menjadi tantangan besar bagi KPU untuk memastikan pemilihan umum tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. KPU juga harus memfasilitasi para pasien yang terpapar virus tersebut. Meskipun masyarakat khawatir, KPU berusaha menjamin bahwa pemilu tidak akan menjadi sumber penularan Covid-19. Selain itu, KPU juga melakukan pelantikan secara online, yang merupakan hal baru bagi mereka. Meskipun demikian, pemilihan umum tetap berjalan lancar dan dimenangkan oleh pasangan calon Asner Silalahi dan Susanti Dewayani, dengan persentase suara 75,3% (Yandri Daniel Damaledo, 2020).

Pada tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi kejadian yang tidak terduga dengan meninggalnya salah satu pemenang pemilu, yaitu Bapak Asner Silalahi, akibat Covid-19. KPU harus menghadapi tantangan tersebut dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Mereka juga melakukan pendistribusian alat ukur suhu untuk memperkecil penyebaran Covid-19 di Kota Pematang Siantar (Anonym, 2022). Tahun-tahun berikutnya, 2022 dan 2023, KPU Kota Pematang Siantar fokus pada persiapan pemilu tahun 2024. Mereka menjalankan berbagai program seperti pendaftaran dan verifikasi partai politik serta pemilih. Koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan untuk memastikan kelancaran pemilu di tahun yang akan datang (Beritasimalungun, 2022). Selain persiapan teknis, KPU juga berusaha meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi melalui media massa dan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, mereka juga menghadapi tantangan ketika beberapa calon anggota tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, yang harus mereka atasi dengan program "ACT" (Awasicegah dan tindak) (Putra Purba, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tantangan dan peran KPU Kota Pematang Siantar sangat bergantung pada situasi dan peristiwa yang sedang terjadi. Di tengah tantangan seperti pandemi Covid-19, KPU Pematang Siantar telah menunjukkan inovasi dalam menjalankan peran mereka. Dengan melihat bagaimana KPU mengatasi berbagai tantangan ini, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi KPU lainnya di Sumatera Utara atau di tempat lain.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, terdapat dua penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Pertama, penelitian oleh Sofyan Kriswantoni pada tahun 2018 mengenai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dalam sejarah nasional Indonesia pada masa Orde

Baru dan Reformasi. Artikel ini menggambarkan perbedaan kondisi pemilu antara kedua masa tersebut. Di masa Orde Baru, demokrasi meredup akibat tekanan politik dari Soeharto, namun membaik saat masuk masa Reformasi. Pemilu pada tahun 2004 menjadi simbol kemajuan demokrasi karena representasi aspirasi masyarakat yang lebih baik, terutama dengan adanya sistem pemilu yang menggabungkan sistem kabupaten dan proporsional, memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dengan lebih baik.

Penelitian kedua yang relevan dengan topik ini ditulis oleh I'ib Sutera Aru Persada dan Fifiiana Wisnaneni pada tahun 2020 dengan judul "Dampak Pandemi COVID-19: Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)." Penelitian ini menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 mengubah dinamika pemilu pada tahun 2020. Awalnya ditunda, namun KPU melakukan digitalisasi pemilu dengan memenuhi syarat-syarat yang ada sebelumnya. KPU-RI juga membentuk biro khusus untuk bekerja sama dengan BPPT dalam proses digitalisasi.

Selain itu, terdapat juga definisi dari dua konsep penting dalam konteks ini, yaitu "Peranan" dan "Tantangan." Menurut Jihanazzahra (2020), peranan merupakan gambaran hubungan sosial yang menentukan kontribusi individu terhadap struktur masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum, peranan KPU adalah sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Sedangkan, menurut Laudia Tysara (2021), tantangan adalah objek yang menantang individu untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam menghadapi masalah. Dalam konteks pemilu, tantangan yang dihadapi oleh KPU adalah mengorganisir pemilu yang adil, bebas dari kecurangan, dan memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal meskipun dalam situasi pandemi seperti COVID-19.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan sangatlah penting untuk menyusun data dengan sistematis. Tulisan ini menggunakan metode sejarah, yang memiliki beberapa tahapan. Menurut Kuntowijoyo, tahap pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yang merupakan tahap pengumpulan sumber. Penulis mengumpulkan sumber sejarah dari wawancara lisan dan sumber berita digital. Wawancara lisan dilakukan dengan Bapak Nanang Wahyudi Harahap, S.SOS, Ketua Bawaslu Pematang Siantar, dan Bapak Muhammad Isman Hutabarat, Ketua KPU Siantar. Wawancara dilakukan melalui panggilan suara pada malam hari. Selain wawancara, data juga diperoleh dari surat kabar digital zaman tersebut, yang diakses melalui website seperti Lintang News.com dan lainnya.

Setelah data terkumpul, dilakukan kritik untuk menilai keautentikan dan kredibilitasnya. Kritik dilakukan secara eksternal dan internal. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, di mana data-data yang terkumpul digabungkan sesuai dengan topik kajian. Proses interpretasi ini juga melibatkan proses historiografi, di mana sejarah ditulis berdasarkan tahun-tahun yang menjadi fokus penelitian ini. Metode sejarah dipilih karena cocok untuk menggali informasi tentang peran dan tantangan KPU Pematang Siantar dari tahun 2019 hingga 2024. Dengan metode ini, penulis dapat menelusuri perkembangan lembaga ini seiring waktu dan menggali berbagai sumber yang relevan untuk menunjang analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**• Peranan Pelaksanaan Pemilu di Kota Pematang Siantar**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Pematang Siantar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pemilu untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Pada tahun 2019, KPU aktif mempersiapkan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan KPU Sumatera Utara dan KPU RI terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Siantar 2020 bersama 269 daerah lainnya. KPU Siantar juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk persiapan PILKADA tersebut (Bawaslu, 2024).

Pada bulan April 2019, KPU Siantar berhasil melaksanakan pemilu dengan partisipasi yang tinggi dari warga. Namun, masalah muncul saat wabah COVID-19 melanda pada tahun 2020. KPU Siantar berupaya menjalankan PILKADA yang telah disiapkan sebelumnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, akibat pandemi, PILKADA terpaksa ditunda sesuai dengan saran pemerintah dan persetujuan dari Komisi II DPR. Untuk mengatasi situasi ini, KPU Siantar memutuskan untuk melakukan pelantikan secara online guna menjaga keselamatan masyarakat. Meskipun PILKADA ditunda, KPU tetap berkomitmen melanjutkan tahapan pemilu dengan memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terjaga.

Pada tanggal 9 Desember 2020, PILKADA akhirnya dilaksanakan, meskipun dalam kondisi yang berbeda karena pandemi. KPU Siantar memastikan bahwa protokol kesehatan ketat diterapkan selama pemilu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hasilnya, pasangan Asner Silalahi dan Susanti Dewayani berhasil memenangkan PILKADA tersebut. Namun, tahun 2021 dibuka dengan berita duka atas meninggalnya calon tunggal PILKADA Pematang Siantar, yaitu Bapak Asner Silalahi, akibat COVID-19. KPU Siantar mengambil langkah taktis dalam menangani kekosongan ini sesuai dengan aturan yang berlaku (Wikipedia, 2020).

Selanjutnya, KPU Siantar terus berperan dalam persiapan menuju PILKADA 2024. Mereka membentuk Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) untuk memperlancar arus informasi dan komunikasi dengan pemilih. KPU juga aktif dalam menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November 2021 guna memastikan persiapan pemilu berjalan lancar. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Mereka juga aktif dalam menyiapkan tahapan pemilu dengan cermat dan teliti, serta memastikan netralitas dan keterbukaan dalam proses pemilu.

Pada tahun 2022, KPU Siantar mendapat penghargaan atas keberhasilannya dalam menggunakan teknologi informasi dalam pemilu. Mereka juga aktif dalam melakukan monitoring terhadap badan bawahannya, seperti Bawaslu, guna memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghadapi Pemilu 2024, KPU Siantar terus berperan dalam menjaga netralitas, memastikan keamanan dan integritas pemilu, serta meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat. Mereka juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pemilu mendatang.

Dengan berbagai langkah dan peranannya, KPU Siantar terus berupaya menjaga demokrasi dan keberlangsungan negara melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **Tantangan Pemilu di Kota Pematang Siantar**

Pada tahun 2020, pihak penyelenggara pemilihan menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal ini, mereka melakukan langkah-langkah baru, seperti pemilihan secara online/virtual. Pada tahapan pemilu tersebut, pihak penyelenggara, diwakili oleh Bapak Daniel, merasa perlu berkoordinasi terkait kondisi Kota Pematang Siantar dan protokol kesehatan saat pandemi. Langkah-langkah seperti rapid test bagi petugas pemungutan suara (PPS) dan petugas sekretariat diambil untuk memastikan keamanan selama pemilu (Widia, dkk, 2022: 3).

Selain itu, Ibu Nurbaiyah Siregar, Plh Ketua KPU Pematang Siantar, menyatakan bahwa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) akan dikurangi, dan seluruh petugas akan menjalani rapid test. Semua pemilih dan petugas diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. Jarak antar pemilih diatur agar tidak saling bersentuhan, dan penggunaan alat coblos disterilkan setiap kali digunakan.

Ibu Titi Anggraini dari Dewan Pembina Perludem menyoroiti beberapa catatan terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak pada 9 Desember 2020. Dia menekankan peningkatan pelanggaran seperti politik uang dan ancaman dari pihak tertentu. Ibu Titi juga mengingatkan bahwa tahapan pilkada akan berlangsung dalam satu putaran saja. Tantangan lainnya meliputi peningkatan pelanggaran protokol kesehatan, permasalahan teknis, rekrutmen petugas pemilihan, dan minimnya akses informasi pemilih. Pihak KPU harus merancang aturan yang bijaksana untuk menghadapi tantangan ini.

Pada tahun 2021, pasangan calon Asner meninggal dunia. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Benget menetapkan Asner-Susanti sebagai paslon terpilih berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 (Febrian, dkk, 2021:2). Mereka kemudian dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Di tahun 2023, Bawaslu menghadapi berbagai permasalahan, termasuk penyebaran alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Mereka meluncurkan program ACT (Awasecegah dan Tindak) untuk mencegah hal ini. Bawaslu juga fokus pada sosialisasi keamanan pemilihan umum dan melakukan pengawasan terhadap kampanye yang adil dan terbuka. Dalam mengatasi permasalahan pemilih yang rendah, Bawaslu melakukan sosialisasi melalui media massa dan sekolah (Wantimpres, 2023). Mereka juga mengundang narasumber dari KPU dan Bawaslu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk menghindari intervensi politik dalam proses pemilu, Bawaslu melakukan sosialisasi mengenai bahaya politik uang dan politik adu domba.

Kota Pematang Siantar dikenal sebagai kota yang toleran dengan masyarakat multi-etnis. Untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat, Bawaslu menggunakan berbagai media, termasuk media sosial dan surat kabar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Pematang Siantar sangat penting dalam menyelenggarakan Pemilu untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPU Siantar terus berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada tahun 2019, KPU Siantar berhasil melaksanakan pemilu dengan partisipasi yang tinggi dari warga. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi tantangan serius yang memaksa KPU untuk mengadaptasi cara kerjanya. Meskipun PILKADA ditunda, KPU

tetap berkomitmen untuk melanjutkan tahapan pemilu dengan memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terjaga. Pada akhirnya, PILKADA dilaksanakan pada Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pada tahun 2021, KPU Siantar menghadapi kekosongan calon akibat meninggalnya salah satu pasangan calon. Mereka mengambil langkah taktis sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengatasi situasi ini. Selanjutnya, KPU terus berperan dalam persiapan menuju PILKADA 2024 dengan membentuk Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) dan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara pemilihan, seperti KPU dan Bawaslu, meliputi penyesuaian terhadap kondisi pandemi, pelanggaran protokol kesehatan, rekrutmen petugas pemilihan, dan minimnya akses informasi pemilih. Namun, dengan langkah-langkah yang diambil, mereka terus berupaya menjaga integritas pemilu dan meningkatkan partisipasi serta literasi politik di masyarakat. Dengan demikian, KPU Siantar terus berperan penting dalam menjaga demokrasi dan keberlangsungan negara melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu di Kota Pematang Siantar:

1. Penguatan Sistem Digitalisasi: Mengingat dampak positif yang dihasilkan oleh digitalisasi dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, KPU Siantar perlu terus memperkuat infrastruktur digitalnya. Langkah ini meliputi peningkatan aksesibilitas dan keamanan data, serta pelatihan bagi petugas pemilu dalam menggunakan teknologi.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi: KPU Siantar dapat meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum, pentingnya partisipasi, dan peran serta dalam menjaga integritas pemilu. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penerbitan panduan, webinar, dan kampanye sosial di media sosial.
3. Kerjasama dengan Pihak Terkait: KPU Siantar perlu terus memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, seperti Bawaslu dan lembaga lainnya, untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerjasama ini juga dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan pencegahan pelanggaran, dan evaluasi hasil pemilu.
4. Keselamatan dan Kesehatan: Mengingat masih adanya ancaman COVID-19, KPU Siantar harus tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Hal ini termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: KPU Siantar perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan menegakkan hukum secara adil terhadap pelanggaran yang terjadi. Langkah ini dapat memberikan jaminan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KPU Siantar dapat memperkuat peranannya dalam menjaga keberlangsungan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiansyah Faizal Benyamin Lola. (2024, Januari 4). Pemilu diantara pandemi covid-19 dan cuaca ekstrem. Retrieved from: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10373/pemilu-diantara-pandemi-covid-19-dan-cuaca-ekstrem>
- [2] Anonym. (2023, Desember 7). Tahapan Pilkada Siantar Dimulai Bulan September 2019. Retrieved from <https://lintangnews.com/tahapan-pilkada-siantar-dimulai-bulanseptember-2019/>
- [3] Anonym. (2023, Desember 9). KPU hibahkan 575 unit thermo gun ke Pemkot Pematangsiantar. Retrieved from <https://sumut.antaranews.com/berita/377790/kpuhibahkan-575-unitthermo-gun-kepemkotpematangsiantar>
- [4] Anonym. (2023, Desember 9). Pasien Terpapar Corona Ikut Mencoblos Di Pilkada Siantar. Retrieved from <https://www.hetanews.com/article/210526/pasien-terpapar-coronaikut-mencoblos-di-pilkada-siantar>
- [5] Anonym. (2024, Januari 4). Perludem: Sejumlah Catatan untuk Diantisipasi Jelang Pilkada 2020. Retrieved from <https://perludem.org/2020/11/23/perludem-sejumlah-catatanuntuk-diantisipasi-jelang-pilkada-2020>
- [6] Anonym. (2024, Januari 4). Pendaftaran Parpol 1-14 Agustus 2022, KPU Siantar Siap
- [7] Laksanakan Seluruh Tahapan. Retrieved from: <https://opsi.id/read/pendaftaran-parpol1-14-agustus-2022-kpu-siantar-siap-laksanakan-seluruh-tahapan>
- [8] Anonym. (2023, Juli 17). The Role of Strategic Youth in Realizing Quality Elections. Retrieved from: <https://wantimpres.go.id/en/2023/07/the-role-of-strategic-youth-in-realizingquality-elections/>
- [9] Berita Simalungun. (2024, Januari 4). KPU Siantar: Kita Tunggu Perpu Pelaksanaan Tahapan. Retrieved from: <http://www.beritasimalungun.com/2020/04/kpu-siantar-kita-tungguperpu.html>
- [10] Berita Simalungun. (2024, Januari 4). Plt Wali Kota Pematangsiantar dan KPU Koordinasi Terkait Pemilu 2024. Retrieved from: <http://www.beritasimalungun.com/2022/08/plt-wali-kota-pematangsiantar-dan-kpu.html>
- [11] Febrian, dkk. (2021). Phenomenon Of The Increasing Single Candidates And Backsliding Democratic In Indonesia. *Journal Hasanuddin Law Review*. 7(2): 124-137
- [12] Gideon Aritonang. (2024, Januari 4). Pikada di Tengah Pandemi, Jumlah Pemilih per TPS
- [13] Dikurangi, Pemilih Diberikan Sarung Tangan. Retrieved from: https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/03/117000/pikada_di_tenga_pandemik_jumlah_pemilih_per_tps_dikurangi_pemilih_diberikan_sarung_tangan
- [14] Harian Mistar. (2024, Januari 4). Cegah Covid-19, Tinta Pemilu Kemungkinan Berbentuk Tetes. Retrieved from: <https://mistar.id/nasional/cegah-covid-19-tinta-pemilu-kemungkinan-berbentuk-tetes/>

- [15] Harian Mistar. (2023, Desember 9). KPU Siantar Jamin Protokol Kesehatan yang Ketat Saat Pencoblosan. Retrieved from: [https://mistar.id/siantar/kpu-siantar-jamin-protokol](https://mistar.id/siantar/kpu-siantar-jamin-protokol-kesehatan-yang-ketat-saat-pencoblosan/) kesehatan-yang-ketat-saat-pencoblosan/
- [16] Harian Mistar. (2023, Desember 9). Positif Covid-19 Meningkatkan, KPU Siantar Lantik PPS Secara Online. Retrieved from: [https://mistar.id/siantar/positif-covid-19-meningkat](https://mistar.id/siantar/positif-covid-19-meningkat-kpu-siantar-lantik-pps-secara-online/) kpu-siantar-lantik-pps-secara-online/
- [17] Harian Mistar. (2023, Desember 9). KPU Siantar Bahas Anggaran Untuk Hindari Penyebaran Covid-19. Retrieved from: [<https://mistar.id/siantar/kpu-siantar-bahas-anggaran-untukhindari-penyebaran-covid-19/>] (<https://mistar.id/siantar/kpu-siantar-bahas-anggaranuntuk>)
- [18] I'ib Sutera Aru Persada & Fifiana Wisnaeni. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(1), 186-202.
- [19] Kuntowijoyo. (2021). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.